



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANGKA STUNTING

Rafliyanto A. Nusi¹, Arifin Tahir², Yacob Noho Nani³

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo¹²³

Email: nusirafliyanto@gmail.com¹ arifin_tahir@ung.ac.id² yacobnani@ung.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Stunting di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari 3 aspek penting yaitu: (1) Perencanaan Kebijakan yakni terkait penyusunan rencana kegiatan penanggulangan stunting (2) Pelaksanaan Kebijakan yang terdiri dari Pembinaan Kader Pembangunan Manusia dalam penanggulangan stunting, sistem manajemen data stunting dalam penanggulangan stunting, koordinasi dalam penanggulangan angka stunting, kerja sama dalam penanggulangan angka stunting (3) Monitoring dan evaluasi dalam penanggulangan angka stunting. Melalui kebijakan pemerintah dan 8 aksi konvergensi peneliti berharap dapat mengurangi angka stunting. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan bahwa Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten belum terlaksana secara optimal sesuai amanah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Bolango nomor 105 tahun 2021. Dilihat dari kebijakan pemerintah dan 8 aksi konvergensi yaitu penyusunan rencana kegiatan, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, koordinasi, kerja sama, monitoring dan evaluasi. Dapat disimpulkan Implementasi penanggulangan angka stunting di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango sudah terlaksana dengan baik dengan memperhatikan peraturan yang sudah cukup dijalankan dengan baik dan optimal.

Kata-kata Kunci: Implementasi kebijakan, penanggulangan angka stunting

PENDAHULUAN

Dalam konteks kebijakan, BAPPEDA juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan nasional terkait pencegahan stunting diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. Hal ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan, serta strategi penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut (Partadisastra & Octaria, 2023). Oleh karena itu, BAPPEDA tidak hanya berperan sebagai perencana, tetapi juga sebagai pengawas dan evaluator dalam upaya penanggulangan stunting. Secara keseluruhan, peran BAPPEDA dalam penanggulangan stunting sangat krusial, karena melibatkan perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, kolaborasi antar sektor, dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, BAPPEDA dapat membantu mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak di Indonesia.

Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori Provinsi dengan kasus stunting tertinggi nasional yakni menempati peringkat ke-12 secara nasional dengan angka prevalensi stunting tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan SKI angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 sebesar 26,9%, artinya angka tersebut naik 3,1 % dari angka prevalensi stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di Provinsi Gorontalo mencapai 23,8% pada Tahun 2022.

Berdasarkan data mengenai Stunting SKI prevalensi tahun 2023 di Provinsi Gorontalo dapat di sajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo 2023

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi
1.	Gorontalo	34,7 %
2.	Gorontalo Utara	30,5 %
3.	Bone Bolango	27,1 %
4.	Kota Gorontalo	23,6 %
5.	Pohuwato	18,4 %
6.	Boalemo	16,0 %

(Sumber Data: Bappeda Bone Bolango)

Berdasarkan data SKI tahun 2023, Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi yaitu sebesar 34,7%. Diikuti oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan angka 30,5 %, selanjutnya Kabupaten Bone Bolango menempati peringkat ketiga sebesar 27,1 %, Kota Gorontalo sebesar 23,6 %, kemudian di ikuti oleh Kabupaten pohuwato 18,4 %, dan prevalensi stunting terendah dicapai oleh Kabupaten sebesar 16,0 %. Prevalensi Stunting Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 berdasarkan SKI, sebesar 27,1 %, artinya angka tersebut naik 4,8 % dari tahun 2022 yaitu sebesar 22,3 %. Angka tersebut melewati angka standar yang ditoleransi *World Health Organization (WHO)*, yakni di bawah 20 persen.

Menurut Peraturan Bupati Bone Bolango No. 105 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Hal ini berdampak pada gangguan dalam proses pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak,

serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis di masa depan. Seiring dengan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkait upaya penanggulangan stunting, terlihat adanya tren positif yang tercermin dari penurunan prevalensi angka penderita stunting. Hal ini dapat diamati dalam data yang tercantum pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten/Kota	SSGBI 2021	SSGI 2022	SKI 2023
Bone Bolango	25,1 %	22,3 %	27,1 %

(Sumber: Pemerintah Provinsi Gorontalo 2021).

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.1, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam persentase indikator di Kabupaten Bone Bolango selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, survei SSGBI mencatat angka sebesar 25,1%. Angka ini mencerminkan kondisi pada waktu itu, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, tingkat gizi masyarakat, atau tingkat pendidikan dan kesadaran terkait masalah kesehatan. Dengan angka sebesar ini, dapat dikatakan bahwa situasi pada tahun 2021 menunjukkan adanya tantangan yang cukup besar di Bone Bolango dalam indikator yang diukur.

Berdasarkan survei SSGI pada tahun 2022, terjadi penurunan angka menjadi 22,3%. Penurunan ini sebesar hampir 3% mengindikasikan adanya perbaikan atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait, yang berhasil menurunkan angka tersebut. Ini bisa berarti

ada peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, program-program gizi, atau kebijakan intervensi yang efektif untuk mengurangi angka tersebut. Penurunan ini patut diapresiasi, karena menandakan adanya upaya yang cukup berhasil dalam menangani permasalahan yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Namun, situasi berubah pada tahun 2023, di mana terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 27,1% berdasarkan data SKI. Peningkatan ini menjadi tanda peringatan bahwa mungkin terdapat masalah baru atau kembalinya tantangan-tantangan yang sebelumnya berhasil ditekan. Kenaikan sekitar 4,8% dari tahun 2022 ke 2023 ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi yang tertunda, perubahan kebijakan, atau kurangnya kontinuitas dalam program-program kesehatan yang telah berjalan. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang terjadi pada tahun 2022 mungkin belum bersifat berkelanjutan.

Salah satu Desa di Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Tilongkabila merupakan Desa yang memiliki angka stunting dan pernah tercatat sebagai desa Lokhus (Lokasi Khusus) stunting. Berikut adalah data prevalensi stunting di Desa Bongoime dalam 3 tahun sejak 2022-2024 di sajikan dalam Tabel.

Tabel 1. 3 Prevalensi Data Stunting Desa Bongoime (Periode Januari-Desember)

No	Tahun	Jumlah total bayi/balita	Jumlah Stunting	Persentase
1.	2022	197	45	22,3%
2.	2023	190	33	17,4%
3.	2024	162	10	6,2%

(Sumber Data: Puskesmas Tilongkabila 2025)

Berdasarkan data pada Tabel diatas mengenai jumlah total bayi/balita dan jumlah kasus stunting dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya penurunan yang konsisten dalam angka stunting baik secara absolut maupun persentase. Pada tahun 2022, dari total 197 bayi/balita terdapat 45 anak yang mengalami stunting, menghasilkan persentase sebesar 22,3%. Tahun berikutnya, pada 2023, jumlah bayi/balita sedikit menurun menjadi 190 anak, sementara jumlah stunting turun menjadi 33 anak dengan persentase 17,4%. Penurunan ini terus berlanjut pada 2024, dengan total 162 bayi/balita dan hanya 10 anak yang mengalami stunting, sehingga persentasenya turun drastis menjadi 6,2%. Data ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terjadi penurunan prevalensi stunting yang signifikan, mengindikasikan keberhasilan upaya penanggulangan stunting di masyarakat, seperti peningkatan gizi, pelayanan kesehatan, serta edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini.

Desa Bongoime telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan angka stunting diantaranya adalah pemberian susu bagi

bayi/balita yang termasuk dalam kategori stunting, pemberian makanan tambahan atau (PMT) sebagai tambahan gizi, pemberian buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan bayi/balita. Semua program yang telah diupayakan telah dilakukan oleh Kader pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Kesehatan yang ada di Desa Bongoime. Selain itu, program sanitasi dan akses air bersih juga menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi program, seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Dinamika yang terjadi di Desa Bongoime menggambarkan bahwa meskipun program penanggulangan stunting telah menunjukkan hasil yang positif, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dalam menangani masalah ini. Studi mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program perlu dilakukan agar dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam menurunkan angka stunting di desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kata-kata yang rinci dan mendalam. Penelitian ini akan mendeskripsikan lebih dalam lagi tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Angka Stunting di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

Data merupakan komponen krusial dalam sebuah penelitian, karena melalui data tersebut peneliti dapat menentukan hasil dari penelitiannya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan. Sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan, metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi tidak terstruktur yang dibantu dengan panduan observasi. Peneliti, sebagai pengamat, dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengamatannya terhadap Implementasi Penanggulangan Angka Stunting di Desa Bongoime. Dalam proses ini, peneliti tidak terlibat secara langsung ataupun penuh dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya bertugas untuk mengamati, mendengarkan, mewawancarai, serta mengembangkan data lapangan sesuai kebutuhan, tanpa menyimpang dari fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah, bebas, dan mendalam (in-depth interview), di mana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada informan untuk memperoleh data yang lebih rinci.

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan penelusuran terhadap dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Perencanaan Kebijakan dalam Penanggulangan Angka Stunting

Dalam penyusunan rencana kegiatan terkait program penanggulangan angka stunting yang ada di Desa Bongoime sudah terlaksana dengan baik. Adanya beberapa pihak yang ikut dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kegiatan ini memberikan hasil rencana kegiatan yang jelas dan tujuannya. Dengan demikian diharapkan dengan adanya susunan rencana kegiatan ini akan memberikan kemudahan kepada pemerintah desa dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam menyukseskan program penanggulangan angka stunting.

Disamping itu penyusunan rencana kegiatan dilakukan melalui musyawarah besar dan juga rembuk stunting kemudia dijadikan dasar dari pembuatan rencana kegiatan yang terdiri dari beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah desa dan KPM seperti pemberian makanan tambahan (PMT), pemberian susu untuk ibu hamil/menyusui, buah-buahan untuk anak balita, susu untuk anak balita dan pemberian makanan tambahan untuk anak yang termasuk pada kategori stunting. Program yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mencukupi asupan nutrisi kepada ibu hamil dan juga meningkatkan kondisi gizi dan pertumbuhan pada anak bayi/balita. Dalam proses penyusunan rencana kegiatan dibutuhkan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, Aparat Desa, KPM, kaur kesehatan desa yakni kader posyandu dan masyarakat untuk merumuskan dan juga menyepakati agar tidak ada tumpang tindih dalam

upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

Pelaksanaan Kebijakan

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Penanggulangan Angka Stunting.

Proses penetapan dan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Bongoime telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan seleksi administratif dan wawancara. Seleksi ini mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta pengetahuan calon kader mengenai kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan program penanggulangan stunting.

Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah desa dalam menyeleksi kader menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan kebijakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Selanjutnya dalam aspek pembinaan, informan dari pemerintah desa dan KPM menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan telah dilakukan secara bertahap dengan dukungan dari pemerintah kabupaten. Kegiatan pembinaan mencakup pelatihan teknis mengenai pengisian dan input data, peningkatan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab KPM, serta metode pendekatan ke masyarakat seperti sosialisasi dan kunjungan langsung ke rumah-rumah (*door to door*). Hasil ini menunjukkan bahwa pembinaan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kapasitas kader agar lebih efektif menjalankan intervensi

penanggulangan stunting. Adanya sinergi antara pemerintah desa, puskesmas, dan kader juga menjadi kunci penting dalam menciptakan integrasi program yang berkelanjutan dan responsif terhadap kondisi lokal.

Sistem Manajemen Data dalam Penanggulangan Angka Stunting

Sistem manajemen data stunting di tingkat desa belum berjalan secara optimal. Proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual dan terbatas pada pencatatan dasar seperti nama, berat badan, tinggi badan, dan kondisi kesehatan bayi atau balita saat kegiatan posyandu. Kader hanya berperan sebagai pencatat dan penginput data, sementara proses analisis dan penentuan status stunting sepenuhnya dilakukan oleh pihak puskesmas atau instansi di tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam alur informasi dan keterbatasan akses terhadap data yang akurat di tingkat desa, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara menyeluruh dan berbasis data.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dea Ananda Adiko (2023) menyatakan bahwa tahapan sistem manajemen data stunting sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Desa dan juga puskesmas. Akan tetapi, fakta dilapangan bahwa setiap pengimputan data masih sedikit perlu adanya peningkatan kualitas petugas pengelola data dan peningkatan cakupan penggunaan digitalisasi pengimputan data agar pelaksanaannya akan lebih optimal.

Koordinasi dalam Penanggulangan Angka Stunting

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting dilakukan melalui koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah desa, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tilongkabila, KPM, kader posyandu, serta masyarakat. Koordinasi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti rapat rutin, pelaksanaan posyandu bulanan, serta sosialisasi mengenai pentingnya gizi dan kesehatan anak. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kelancaran program dan mencegah terjadinya miskomunikasi di lapangan. Namun demikian, meskipun koordinasi telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan menjadwalkan pertemuan yang lebih sering dan memperluas keterlibatan seluruh unsur masyarakat untuk mendukung program secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Kerja Sama dalam Penanggulangan Angka Stunting

Kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan stunting telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Berbagai pihak seperti kader desa, kader kesehatan, kader KB, petugas gizi, KPM, serta tenaga kesehatan dari puskesmas terlibat aktif dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pendataan bayi dan balita, pengukuran antropometri, hingga pemberian makanan tambahan dan vitamin.

Proses kerja sama ini diperkuat dengan kegiatan posyandu yang rutin dilakukan setiap

bulan serta pelaporan berkala setiap tiga bulan. Pendataan yang dilakukan oleh kader di tingkat dusun menjadi dasar penting bagi KPM dalam menyusun laporan dan bagi puskesmas serta dinas kesehatan dalam menentukan status stunting anak. Kerja sama ini membuktikan bahwa kolaborasi yang sinergis dan pembagian peran yang efektif sangat membantu kelancaran pelaksanaan program serta meminimalkan miskomunikasi dalam upaya penanggulangan stunting.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dalam Penanggulangan Angka Stunting

Dalam program penanggulangan stunting di Desa Bongoime dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu, dan puskesmas. Proses monitoring berlangsung secara rutin, dengan pelaporan data dilakukan setiap bulan, sementara laporan menyeluruh disusun dan disampaikan setiap tiga bulan. Fokus utama monitoring mencakup kehadiran masyarakat di posyandu, kesesuaian data bayi dan balita dengan kondisi lapangan, serta ketepatan sasaran dalam pemberian makanan tambahan dan susu.

Selain itu, kegiatan evaluasi juga mencakup pembahasan penggunaan anggaran dalam rapat-rapat antar pemangku kepentingan. Mekanisme pelaporan ini tidak hanya memastikan keteraturan pelaksanaan program, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan masyarakat secara aktual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan penanggulangan angka stunting di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango terkait dengan fokus dan sub fokus maka dapat tarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Implementasi penanggulangan angka stunting di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango sudah terlaksana dengan baik seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 105 Tahun 2021 tentang penanggulangan angka stunting. Hal ini dapat dilihat dari aspek konvergensi dalam penanggulangan stunting sudah berjalan dengan baik dan optimal.

Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan stunting yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah Desa Bongoime telah terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan rembuk stunting dengan melibatkan berbagai pihak serta rencana kegiatan yang di susun juga memiliki sasaran dan tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan desa.

Pada pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan angka stunting di Desa Bongoime sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari: a) Pembinaan kader pembangunan manusia sebagai pelaksana kebijakan di tingkat Desa Bongoime sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan bersifat terbatas melalui

pelatihan dan pendampingan berkala yang difasilitasi oleh pemerintah desa. b) Sistem manajemen data stunting di tingkat desa sudah berjalan dengan cukup baik tetapi masih belum memadai. Pendataan masih dilakukan secara manual dan keterlibatan KPM serta kader dalam pengolahan data masih terbatas, sehingga akses terhadap data yang akurat belum maksimal. c) Koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa, KPM, kader posyandu, dan puskesmas telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal dalam pengambilan langkah strategis. Frekuensi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam koordinasi masih perlu ditingkatkan. d) Kerja sama antara pelaksana kebijakan dengan pihak terkait sudah berjalan cukup efektif, terutama dalam pelaksanaan posyandu dan program pemberian makanan tambahan, namun masih perlu diperkuat dalam aspek peran serta masyarakat secara menyeluruh.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan angka stunting di Desa Bongoime sudah mulai diterapkan tetapi belum berjalan dengan efektif dan efisien. Laporan monitoring dilakukan setiap bulan oleh KPM dan kader, tetapi evaluasi menyeluruh masih terbatas pada pelaporan triwulan dan belum sepenuhnya berbasis pada data real-time serta hasil yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, VL, dan E. van de Vliert. 1984a. *"Perspektif Teori Peran tentang Proses Transisi."* Dalam *Transisi Peran: Eksplorasi dan Penjelasan*, diedit oleh VL Allen dan E. van de Vliert, hal.

3-18. NY: Pleno.

<https://doi.org/10.32493/skr.v7i1.4570>

- Agustin, L., & Rahmawati, D. (2021). Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Stunting. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.35473/ijm.v4i1.715>
- Astuti, D. D., Adriani, R. B., & Handayani, T. W. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Stop Generasi Stunting. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 156–162.
- Bates, FL, dan CC Harvey. 1975. Struktur Sistem Sosial. New York: Wiley.
- Biddle, Bruce J. 1986. “Perkembangan Terbaru dalam Teori Peran.” Tinjauan Tahunan Sosiologi 12: 67-92.
- Biddle, Bruce J. 1979. Teori Peran: Harapan, Identitas, dan Perilaku. NY: Academic Press.
- Dermawan, A., Mahanim, M., & Siregar, N. (2022). Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1(2), 98–104. <https://doi.org/10.56854/ba.v1i2.124>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Desrinelti, 2021. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Devi Sari, Sri Achadi Nugraheni, & Mohammad Zen Rahfiludin. (2023). Bagaimana Kontribusi Intervensi Gizi Sensitif dalam Upaya Penurunan Stunting?: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(5), 885–895. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i5.3416>
- Dewi, D. P., Harjoyo, H., & Salam, A. (2020). Prosedur Administrasi Jasa Pengiriman Barang Di Pt Citra Van Titipan Kilat Tangerang. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 7(1), 1.
- Diana, S. N., Firmani, U., Rahim, A. R., Widiharti, W., & Sukaris, S. (2024). Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Untuk Pencegahan Stunting. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 6(1), 105.
- Dwiva, D., Wardani, K., Fayza, N., Masyarakat, P., Siliwangi, U., Masyarakat, P., Siliwangi, U., Masyarakat, P., Siliwangi, U., Masyarakat, P., Siliwangi, U., Masyarakat, P., Siliwangi, U., Masyarakat, P., & Siliwangi, U. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Volume 02 Nomor 02 (Juni) 2024 Pendampingan Kpm Untuk Pendataan Stunting Menggunakan Rumus Manual Excel*. 02.
- Ernawati, A. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rsd Raa Soewondo Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 12(2), 136–147. <https://doi.org/10.33658/jl.v12i2.43>
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 277. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8308>
- Fauziyah, A., Rachmi, R., Mahdalena, V., & Handayani, L. (2023). Penyuluhan Pencegahan Stunting pada Balita di Daerah Jakarta Selatan. *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)*, 4(1), 22–26. <https://doi.org/10.36590/jagri.v4i1.522>
- Fitri, N., Widiawati, N., Ningtyas, R. P., Sarnyoto, F. D. A., Nisa, W., Ibnistnaini, W., Ardha, M. D., Aima, Q., Salmanto, S., & Novitasari, S. (2022). Strategi Gerakan Cegah Stunting Menggunakan Metode Sosialisasi di Desa Darakunci, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 1(2), 80–86.

<https://doi.org/10.29303/jpimi.v1i2.1471>

- Hamida, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44. <https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.250>
- Haria, D., Sembiring, K., Sebayang, J., & Simbolon, B. R. (2023). Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Stunting Desa Di Desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Governance Opinion*, 8(1), 10–18.
- Harjanti, A. E., Hakim, C. B., & Salim, N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dalam Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5, 14–20.
- Hermawan, D., Kurniasari, D., Sandayanti, V., & Listyaningsih, E. (2023). Program Pendampingan Kader Posyandu untuk Penanganan Stunting di Kelurahan Way Gubak Bandar Lampung. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(1), 404–414. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i1.8677>
- Khobibah, Tri Nurhidayati, & Rozikhan. (2024). Pelatihan Dan Pendampingan Kader Pembangunan Manusia Dalam Deteksi Stunting Sebagai Upaya Konvergensi Penanganan Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 6(1), 1–6.
- Krisnadi, A. R. (2018). Gastronomi Makanan Betawi Sebagai Salah Satu Identitas Budaya Daerah. *National Conference of Creative Industry*, September, 5–6. <https://doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1221>
- M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Madiuw, D., Muskita, M., & Tahanora, F. (2024). Optimalisasi Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kelurahan Kudamati. *Karya Kesehatan Siwalima*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.54639/kks.v2i2.1066>
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Nasution, F. H. (2016). Peran Administrasi Perkantoran. *Jurnal WartaDharmawangsa*, 1829–7463.
- Noviyani, P. S. R. E. P. (2023). Implementasi Proqram Perluasan Jangkauan Umkm Di Kabupaten Balangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2134–2139.
- Nurak A et al. (2023). Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Tengah Dalam Upaya Penanggulangan Stunting. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1349–1358.
- Nurfaidah, H., Repa Nurlaela, & Regi Refian Garis. (2023). Strategi Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Perangkat Daerah Dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Ciamis. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(2), 113–123.
- Partadisastra, A. M., & Octaria, Y. C. (2023). Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(4),

214. <https://doi.org/10.22146/jkki.90281>
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi sebuah program berbasis riset aksi dalam meningkatkan kualitas program. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 38-46.
- Perpres. (2020). *Peraturan Presiden No. 28. 1.*
- Primasari, Y., & Keliat, budi anna. (2020). Praktik pengasuhan sebagai upaya pencegahan dampak stunting pada perkembangan psikososial anak-kanak. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 3(3), 263–272.
- Rahman, E., & Thalib, T. (2023). 9464-9478. 3, 9464–9478.
- Ratna Kusuma, A., & Apriani, F. (2018). Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Kkbpk) Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Pada Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda. 6, 8021–8034.
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal RASI*, 3(1). <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Tahir, A., Daud, A. R., IP, S., & Podungge, D. (2022). *Strategi Pelayanan Publik: (Upaya Meningkatkan Kesadaran Vaksinasi Covid 19 Di Polres Gorontalo)*. Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Tahir, A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. Tarumanagara University.
- Tahir, A. (2011). Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Implementasi Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo. FEB UNG.
- Tahir, A. (2013) Proses Implementasi Kebijakan Tranparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Volume 11, No 1.
- Tahir, A. (2014), Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, alfabeta.
- Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 01. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Adminitrasi Pendidikan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.